

Politik Indifferensia

TRAGEDI konstitusi Senanggi 1998 telah terjadi dua puluh tahun lalu. Seperti banyak pelanggaran hak asasi manusia berat lain, penyelesaian kasus Senanggi 1998 masih gelap gulita hingga pertengahan dan dekade pascatragedi. Gejala kemertanangan penyintas dan keluarga korban politiktragedi memuat presiden menyelesaikan kasus tersebut. Berdiri nirkata setiap Kamis di depan Istana Merdeka, mereka mengingatkan presiden akan tanggung jawab politiknya.

Kalkulasi politik praktis sekadar mempertimbangan potensi pemabubahan atau pengurangan dukungan suara penyintas dan keluarga korban kepada kandidat presiden 2019. Tim pemertangan kandidat rentan mengabdikan minoritas penyintas dan keluarga korban. Penyintas dan keluarga korban mengarahkan kembali wacana politik dari kalkulasi suara ke kesetaraan kemanusiaan Indonesia ketika jangankan calon presiden mengabdikan itu hak asasi manusia.

Terorisasi Masa Lalu

Rakus jejak korban pangsang calon presiden dalam perkara hak asasi manusia memandera mereka pada tingkatan berbeda. Dakwaan keterlibatan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia sebelum era reformasi menyudura calon presiden Prabowo Subianto. Komisioner untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang rutin-rutin sebelumnya wariatkan selama periode pemerintahan menyudura kandidat presiden Joko Widodo.

Tragedi Senanggi 1998 yang berpusat pada 23 November menenggelamkan jejak darah dan luka pada tubuh korban. Selanjut 18 orang meninggal karena akibat serangan kekerasan, termasuk 6 mahasiswa, 456 orang menderita luka karena kekerasan senjata dan pukulan benda keras. Meredakan keseruan, tubuh korban dalam arti paling mendasar, penyintas dan keluarga korban memuat potretwajah menjabarkan sorok jejak terdapat pelaku ke-Merotan.

Ali-alih potretwajah ekspresi bebukan yang merupakan agenda reformasi, penggambaran menjadi sama utama utama pemerintah yang alih berganti pascatragedi. Ketika masa media membeberatkan suara

Mutiara Andalas

telanjang rekaman kekerasan tragedi, pelaku dan institusi yang menanggungnya mengabdikan jejak bebukan yang bertanggugjawab atas darah dan luka korban. Mereka memuat diri sebagai bukan pelanggaran hak asasi manusia, dan tragedi sebagai takdir sejarah.

Penyintas dan keluarga korban menenggelamkan jawab politik calon presiden Prabowo-Subianto atas dakwaan bertanggugjawab atas pelanggaran hak asasi manusia menjelang reformasi. Mereka juga menenggelamkan program Nawacita kandidat Presiden Joko Widodo yang mengperistiwakan kehadiran negara, termasuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pansatin calon perlu menenggelamkan kebenaran politik 'keberpihakan' atau 'terakutkan'.

Tegang Politik

Elat Wicak, penyintas Holokaus dalam *The Trial of G-d* (1995), mengingatkan publik akan bebukan politik indifferensia. Ketidakpedulian kita memberikan lesari kepada pelaku untuk mengabdikan tubuh korban. Ketidukaan memanggul kita *et cetera* teras. Tragedi bebukan memanggul kita untuk mengabdikan bebukan. Pengabdian terhadap korban tragedi memberikan inspirasi kepada pelaku bebukan.

Sebagaimana Mahkamah Konstitusi memuat pembeberkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pada 2006, penyintas dan keluarga korban juga menenggelamkan Dewan Kerukunan Nasional bentukan pemerintahan Presiden Jokowi pada 2018. Mengabdikan 'bagiun' 'konstitusional' dan 'kerukunan' dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, pemerintah mengabdikan kebenaran yang merupakan jangkarwacana.

Kebenaran yang beberapa lama gelap gulita membeberkan masa lalu terenggelamkan Presiden Joko Widodo mem-

buka tangan terhadap penyintas dan keluarga korban yang telah menanggung dengan berdiri nirkata di depan Istana Merdeka. Penyintas dan keluarga korban menenggelamkan kebenaran politik presiden untuk menenggelamkan ekspresi bebukan yang merupakan agenda reformasi. Kebenaran menjadi 'bagiun' mereka dalam memuat potretwajah HAM *et cetera*.

Bagiun Indifferensia

Setelah berbalik-balik mendampingi institusi-institusi pemerintah dan kembali tanpa kemajuan dalam penyelesaian kasus, kata-kata telah kehilangan arti. Penyintas dan keluarga korban kini memilih bebukan nirkata di depan Istana Merdeka dua puluh tahun setelah Tragedi Senanggi 1998. Menjelang pemilihan presiden 2019, mereka mengabdikan pertanyaan kritis kepada kandidat tentang inklusivitas 'bagiun' politik baru 'kerukunan' dan 'keberpihakan'.

Peringatan dan dekade Tragedi Senanggi 1998 mengingatkan publik bahwa honor atau *honor* bukan satu-satunya kontrol dari kebenaran. Belajar dari penyintas dan keluarga korban, indifferensia merupakan kontras lain dari kebenaran. Indifferensia bebukan lebih bebukan daripada bebukan bebukan dan ujaran kebencian yang membeberkan potretwajah bebukan bebukan bebukan politik Indonesia bebukan ini. *Q. e*

**Mutiara Andalas, Dosen*

Penelitian Kependidikan Katak

Universitas Sains Dharma Yogyakarta

Pojok KR

BMKG bentuk pasukan anti-bukan.

- **Kak ada yang tega memantapulasi cuaca.**

Masim hujan, potensi DB harus diantisipasi.

- **Pemerintah daerah tak boleh kecolongan.**

PKL tetap jadi bagian kawasan Maliboro.

- **Yang penting jangan 'nutuk' pembeli.**

Berita